KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi X Harapkan Ada Evaluasi Total
Tanggal : Kamis, 05 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Indikasi Kecurangan TKA

Komisi X Harapkan Ada Evaluasi Total



FOTO: WEB PKB

Hilman Mufidi

SENAYAN mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengevaluasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Desakan ini menyusul ditemukannya indikasi pelanggaran dan kecurangan dalam ujian terstandar nasional tersebut.

Anggota Komisi X DPR Hilman Mufidi mengatakan, sebanyak 308 satuan pendidikan jenjang SMA yang terindikasi melakukan kecurangan dalam TKA 2026 tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Karena maraknya kecurangan dinilai berisiko merusak kredibilitas TKA yang semestinya menjadi tolok ukur akademik siswa yang sah dan tepercaya.

Hilman menegaskan, esensi TKA bukan sekadar menyelenggarakan ujian dan menghasilkan nilai, tetapi mesti mampu memberikan gambaran kemampuan akademik siswa secara objektif. "Jika prosesnya tidak jujur, bagaimana kita bisa memastikan hasilnya benar-benar menggambarkan kemampuan siswa," ujar Hilman di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Sebelumnya, Kemendikdasmen tengah mendalami laporan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan TKA 2026. Hasilnya, berdasarkan lampiran data yang diunggah akun Instagram @masukptn, surat bernomor 0487/B/F/HM.00.00/2026 mencatat dugaan pelanggaran TKA 2026 tertanggal 30 Oktober 2026, terdapat 308 sekolah yang tersebar di 32 provinsi. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebagai pelanggar terbanyak, yakni 37. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat dengan 35 sekolah dan Jawa Timur sebanyak 25 sekolah.

Hilman melanjutkan, evaluasi mesti menyasar seluruh rantai pelaksanaan. Mulai dari kesiapan sarana komputer sekolah, sistem pengawasan di ruang ujian, kerahasiaan bank soal, hingga mekanisme sanksi tegas. Aturan hukum wajib ditegakkan secara objektif agar memberikan efek jera serta tidak mengorbankan integritas siswa yang mengerjakan secara jujur.

Ia mengingatkan, jangan sampai sekolah yang menjalankan TKA dengan jujur justru dirugikan oleh satuan pendidikan yang melakukan kecurangan. "Ini menyangkut keadilan bagi siswa yang sudah belajar dan mempersiapkan diri," imbuh politisi PKB ini.

Hilman mengingatkan Kemendikdasmen agar penanganan kasus 308 sekolah ini tidak menguap begitu saja atau hanya berujung pada sanksi teguran formalitas di atas kertas. Pembuktian pelanggaran mesti ditelusuri secara transparan dengan sanksi administratif hingga sanksi pidana jika ditemukan keterlibatan oknum terorganisasi.

Bila tidak ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terbukti, praktik serupa akan terus berulang karena tidak ada konsekuensi yang memberikan efek jera. "Kita ingin TKA menjadi instrumen penilaian yang dipercaya," tandas legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini. ■ TIF